

# PERAN BPS GROUND CHECK DTSEN - KEMENSOS



*Disampaikan pada Briefing dengan BPS Provinsi Selindo*

Jakarta, 25 Februari 2025



**Ateng Hartono**

Deputi Bidang Statistik Sosial



# INSTRUKSI PRESIDEN NO. 4 TAHUN 2025



SALINAN

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mendukung keterpaduan program pembangunan nasional dan sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang memerlukan pengelolaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang akurat dan terintegrasi guna mencapai tujuan pembangunan yang terukur dan berkelanjutan sebagai dasar kebijakan, perencanaan, dan evaluasi pembangunan yang efektif, dengan ini menginstruksikan:

Kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Sosial;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Menteri Keuangan;
9. Menteri Komunikasi dan Digital;
10. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
11. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
13. Menteri Agama;
14. Kepala Badan Pusat Statistik;
15. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
16. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
17. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan
18. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Untuk KESATU :

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan integrasi data sosial dan ekonomi nasional dengan memastikan akurasi, interoperabilitas, dan pemutakhiran data, serta sinergi antar kementerian/lembaga.

KEDUA ...

SK No 235847 A



## Tugas Badan Pusat Statistik

1. Menetapkan **sumber dan jenis data serta pedoman integrasi** data yang digunakan dalam penyusunan dan pengelolaan integrasi DTSEN;
2. **Menerima DTSEN** yang mencakup informasi **by name by address** dari Kementerian/Lembaga, dan melakukan integrasi data.....;
3. **Menyusun DTSEN** yang akurat, terkini, dan terintegrasi;
4. Mengelola DTSEN untuk penyelenggaraan kegiatan statistik, termasuk **pemutakhiran dan pengamanan data**;
5. **Menyerahkan** pemanfaatan DTSEN kepada Menko PM, Men PPN, dan Mensos.....;
6. **Melaporkan** pelaksanaan DTSEN kepada Presiden secara berkala....;



## Tugas Kementerian Sosial

Melakukan **sinkronisasi Bersama Badan Pusat Statistik** untuk mendukung pemutakhiran data Tunggal sosial dan Ekonomi Nasional sebagai acuan utama dalam **penetapan pemberian bantuan dan/atau pemberdayaan sosial**

# PENYERAHAN DTSEN **SESUAI AMANAT INPRES**

Inpres No. 4/2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional

## DTSEN

(per 3 Februari)



**285.579.122** penduduk

**93.025.360** keluarga

**Data *by name by address* dilindungi Undang-Undang**

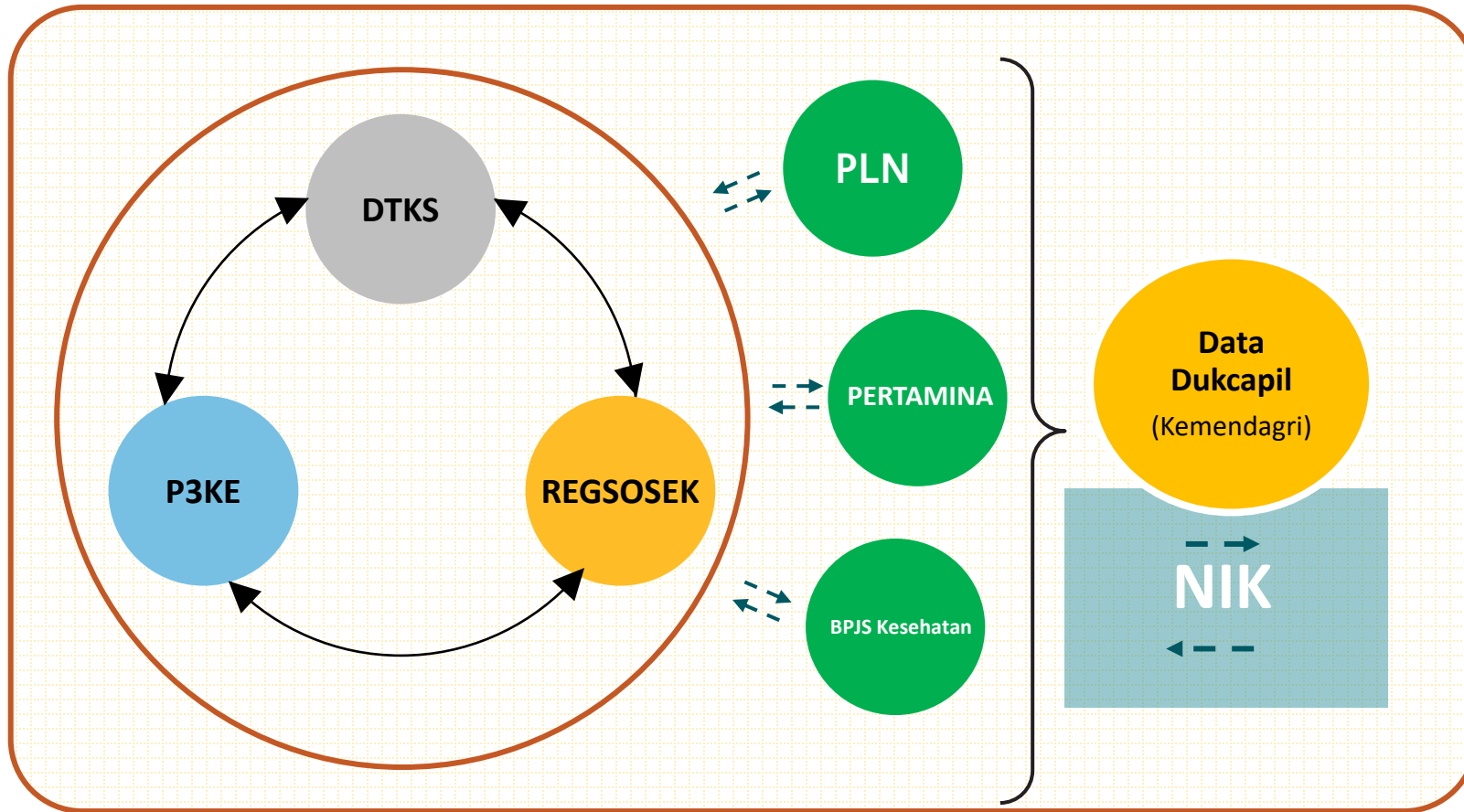


**20 Februari 2025**



▶ BPS menyerahkan DTSEN sesuai Amanah INPRES 4/2025 Tentang Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional kepada 3 Menteri, yaitu: Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Sosial, dan Menko Pemberdayaan Masyarakat

# KERANGKA KERJA DATA TUNGGAL SOSIAL EKONOMI NASIONAL



**Data Tunggal  
Sosial Ekonomi  
Nasional  
(DTSEN)**

Kolaborasi  
Pemutakhiran  
(ground check):  
Kemensos dgn  
BPS



Kemensos Menyalurkan Bansos  
Tahap II dst (Triwulan II dst)  
Berdasarkan DTSEN

DTSEN menyatukan 3 jenis data sosial ekonomi ditambah dengan data administratif lain untuk memutakhiran data yang ada.  
DTSEN divalidasi dengan data kependudukan di Dukcapil

Keterangan:

↔ Unifikasi

↔ Pengayaan dan validasi data



# KOLABORASI KEMENSOS BPS



## KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430 Telp. (021) 3103591 <http://www.kemensos.go.id>

Nomor : 265/1/DI.02/2/2025  
Sifat : Penting  
Hal : Permohonan Dukungan

24 Februari 2025

Yth :  
Kepala Badan Pusat Statistik

di -  
Tempat

Sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Menteri Sosial telah menerima DTSEN dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pada DTSEN tersebut, masih terdapat individu dengan status Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak aktif berdasarkan hasil pemadanan data dengan data kependudukan dan pencatatan sipil Kementerian Dalam Negeri. Selain status NIK tidak aktif, terdapat indikasi *Inclusion Error* penerima bantuan dan *Exclusion Error* dari DTSEN.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Pendamping PKH akan melakukan pengecekan lapangan (*ground checking*) untuk memastikan keberadaan keluarga *Inclusion* dan *Exclusion Error* serta individu dengan NIK tidak aktif. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan dan kerjasama dari BPS dalam rangka :

1. Membantu proses pelatihan pendamping PKH yang terstandarisasi, menyediakan instruktur serta infrastruktur pendukung pelatihan.
2. Membantu proses pengawalan *ground checking* di lapangan melalui koordinasi dan komunikasi BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait.
3. Membantu melakukan pengawalan hasil *ground checking* lapangan baik melalui *National Statistics Command Center* (NSCC) maupun monitoring dan evaluasi serta hal terkait lainnya.

Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa telah ada Nota Kesepahaman antara Kemensos dengan BPS Nomor 07 Tahun 2018 dan Nomor 08/KS.M/02-VII/2018 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik Kesejahteraan Sosial yang telah berakhir pada tanggal 1 Juli 2023. Untuk memperkuat kerja sama antara Kemensos dengan BPS perlu dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman yang baru.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Sekretaris Jenderal

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Pendamping PKH akan melakukan pengecekan lapangan (*ground checking*) untuk memastikan keberadaan keluarga *Inclusion* dan *Exclusion Error* serta individu dengan NIK tidak aktif. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan dan kerjasama dari BPS dalam rangka :



1. Membantu proses pelatihan pendamping PKH yang terstandarisasi, menyediakan instruktur serta infrastruktur pendukung pelatihan.
2. Membantu proses pengawalan *ground checking* di lapangan melalui koordinasi dan komunikasi BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait.
3. Membantu melakukan pengawalan hasil *ground checking* lapangan baik melalui *National Statistics Command Center* (NSCC) maupun monitoring dan evaluasi serta hal terkait lainnya.

## PENYUSUNAN PEDOMAN



Pedoman bagi pakai data *by name by address* akan diatur melalui Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas.

## PEMANFAATAN DTSEN UNTUK BANTUAN SOSIAL

*masa transisi*



Penyaluran Bansos Tahap 1 (Triwulan 1-2025)

*masa pemanfaatan*

**DTSEN**

Penyaluran Bansos Tahap 2 dan seterusnya

## PEMUTAKHIRAN OLEH KEMENSOS



Sebelum penyaluran Bansos Tahap 2, Kementerian Sosial akan melakukan **verifikasi data melalui pengecekan lapangan** (Ground Check)



BPS berkomitmen untuk mendukung kelancaran kegiatan tersebut dengan:

- Memberikan usulan variabel untuk verifikasi data
- Memberikan **pelatihan kepada Pendamping PKH** dalam pengumpulan data sesuai dengan konsep definisi
- Melakukan monitoring dan evaluasi
- Melakukan pemeringkatan ulang dari hasil verifikasi lapangan

1. Perkuat Komunikasi dan Kolaborasi Kepala BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Dinas Sosial atau Dinas/Instansi yang Menangani Kegiatan Sosial
2. Pendampingan Pegawai BPS Provinsi dan Kab/Kota terhadap Petugas Pendamping PKH (silakan rasio pendampingan disesuaikan dengan daerah)
3. Sertakan Peran Dinas Sosial atau Dinas/Instansi yang Menangani Kegiatan Sosial
4. Pendampingan melalui WA Group/Komunikasi Media
5. Tujuan Pendampingan: Mengawal Ketepatan Pelaporan dan Menjaga Kualitas Pemutakhiran
6. Buat Koordinator dan Tim Mengawal Pemutakhiran
7. BPS: Optimalkan Penggunaan NSCC

# PERAN BPS PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA



**Petugas Ground Check**

**Pendamping PKH (Kementerian Sosial)**  
**±33.603** orang tersebar di 38 Provinsi



## **Variabel dan Aplikasi**

- **Variabel Ground Check** merupakan variabel yang digunakan untuk PMT dan ditentukan oleh BPS
- Aplikasi pendataan dan dashboard dibangun oleh Kemensos



## **BPS Provinsi dan BPS Kab/Kota**

- Memberikan pembinaan kepada pendamping PKH melalui pelatihan konsep dan definisi dari variabel yang akan dikumpulkan.
- Melaksanakan pelatihan pengumpulan data variabel Ground Check DTSEN kepada pendamping PKH
- Bersama dinas sosial provinsi/kabupaten/kota melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Ground Check DTSEN

### **Metode Pelatihan**

#### **Pelatihan 2 tahap:**

1. Pelatihan Innas oleh Intama BPS RI
2. Pelatihan Pendamping PKH oleh Innas BPS Prov/Kab/Kota



### **Pelatihan Innas**

#### **Pelatihan Jarak Jauh (via Zoom) dengan 36 link (kelas) terpisah**

- **Metode:** Pemaparan dan pembahasan materi, dilengkapi dengan pre-test dan post-test serta praktek penggunaan aplikasi oleh Kemensos
- **Jumlah peserta per kelas:** 20 - 40 orang



# PEMETAAN JUMLAH PENDAMPING PKH DAN INNAS

| Provinsi                      | Jumlah Pendamping PKH | Kebutuhan Instruktur Nasional |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| ACEH                          | 1,158                 | 39                            |
| SUMATERA UTARA                | 1,660                 | 55                            |
| SUMATERA BARAT                | 718                   | 24                            |
| RIAU                          | 672                   | 22                            |
| JAMBI                         | 547                   | 18                            |
| SUMATERA SELATAN              | 1,098                 | 37                            |
| BENGKULU                      | 449                   | 15                            |
| LAMPUNG                       | 1,581                 | 53                            |
| KEPULAUAN BANGKA<br>BELITUNG  | 114                   | 4                             |
| KEPULAUAN RIAU                | 186                   | 6                             |
| JAWA BARAT                    | 4,869                 | 162                           |
| JAWA TENGAH                   | 4,987                 | 166                           |
| DAERAH ISTIMEWA<br>YOGYAKARTA | 731                   | 24                            |
| JAWA TIMUR                    | 5,215                 | 174                           |
| BANTEN                        | 736                   | 25                            |
| DKI JAKARTA                   | 214                   | 7                             |
| BALI                          | 282                   | 9                             |
| NUSA TENGGARA<br>BARAT        | 1,115                 | 37                            |
| NUSA TENGGARA<br>TIMUR        | 1,394                 | 46                            |

| Provinsi           | Jumlah Pendamping PKH | Kebutuhan Instruktur Nasional |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------|
| KALIMANTAN BARAT   | 605                   | 20                            |
| KALIMANTAN TENGAH  | 235                   | 8                             |
| KALIMANTAN SELATAN | 418                   | 14                            |
| KALIMANTAN TIMUR   | 272                   | 9                             |
| KALIMANTAN UTARA   | 58                    | 2                             |
| SULAWESI UTARA     | 407                   | 14                            |
| SULAWESI TENGAH    | 549                   | 18                            |
| SULAWESI SELATAN   | 1,035                 | 35                            |
| SULAWESI TENGGARA  | 447                   | 15                            |
| GORONTALO          | 270                   | 9                             |
| SULAWESI BARAT     | 233                   | 8                             |
| MALUKU             | 385                   | 13                            |
| MALUKU UTARA       | 177                   | 6                             |
| PAPUA BARAT        | 214                   | 7                             |
| PAPUA BARAT DAYA   | 109                   | 4                             |
| PAPUA PEGUNUNGAN   | 139                   | 5                             |
| P A P U A          | 159                   | 5                             |
| PAPUA SELATAN      | 74                    | 2                             |
| PAPUA TENGAH       | 91                    | 3                             |

# TAHAPAN KEGIATAN



Selasa, 25 Februari 2025

## 1 Briefing BPS Provinsi Selindo

Penyelenggara: BPS RI  
Tempat: Zoom  
Waktu: 07.30 – selesai  
Peserta: BPS Provinsi



Rabu, 26 Februari 2025

## 2 Pencanaan Ground Check oleh Menteri Sosial dan Kepala BPS

Penyelenggara: Kemensos & BPS RI  
Tempat: NSCC (luring), zoom dan livestream (daring)  
Waktu: 09.00 – 11.00  
Peserta: Kepala BPS dan Dinsos Prov/Kab/Kota,  
Pendamping PKH

## 3 Pelatihan Instruktur Nasional

Penyelenggara: BPS RI  
Tempat: Zoom (36 kelas terpisah)  
Waktu: 08.00 – 15.30  
Peserta: Innas (BPS Prov/Kab/Kota)



Kamis, 27 Februari 2025

## 4 Pelatihan Pendamping PKH

Penyelenggara: BPS Provinsi  
Tempat: Zoom  
Waktu: 08.00 – 15.30  
Peserta: Pendamping PKH Selindo



Jumat, 28 Februari 2025

## 5 Pelatihan Monev BPS Dinsos (Tentative)

Penyelenggara: BPS RI?  
Tempat: Zoom  
Waktu: 08.00 – 15.30  
Peserta: BPS dan Dinsos Kab/Kota

## Materi

- **Pemaparan Bahan Ajar Konsep dan Definisi Variabel** sesuai dengan Pendataan Awal Regsosek 2022
- **Pemaparan melalui Livestream Youtube**
  1. Sosialisasi oleh Menteri Sosial dan Kepala BPS
  2. Organisasi Lapangan oleh Kementerian Sosial
  3. Pengenalan Aplikasi oleh Kementerian Sosial



## 39 Variabel Groundcheck

### 13 Variabel Individu

Variabel yang dikumpulkan adalah **identitas, status hubungan dengan kepala keluarga status perkawinan, pekerjaan, kepemilikan usaha, disabilitas, dan riwayat penyakit kronis**

### 26 Variabel Keluarga

Variabel yang dikumpulkan adalah **identitas keluarga, perumahan, sumber air minum utama, data ID meteran PLN, sumber penerangan utama, sanitasi, kepemilikan aset, dan kepemilikan ternak**

## Rundown

Kamis, 27 Februari 2025 (Zoom)

| No | Jam           | Materi  | Pemateri                 |
|----|---------------|---|--------------------------|
|    |               | Gambaran Umum Kegiatan  | Livestream Mensos - KBPS |
| 1  | 08.00 - 08.05 | Pembukaan   | Innas                    |
| 2  | 08.05 - 08.30 | Pretest   | Innas                    |
| 3  | 08.30 - 10.00 | Keterangan Individu Responden (Identitas, Hubungan dengan KK, Perkawinan)           | Innas                    |
| 4  | 10.00 - 10.15 | Rehat   | Innas                    |
| 5  | 10.15 - 12.15 | Keterangan Individu Responden (Pendidikan, Pekerjaan, Kepemilikan Usaha, Kesehatan) | Innas                    |
| 6  | 12.00 - 13.30 | Istirahat   | Innas                    |
| 7  | 13.30 - 15.00 | Keterangan Informasi Keluarga (Identitas Keluarga, Perumahan, Kepemilikan Aset)     | Innas                    |
| 8  | 15.00 - 15.25 | Post Test   | Innas                    |
| 9  | 15.25 - 15.30 | Penutupan   | Innas                    |

1. Penyediaan akun zoom di BPS Provinsi
2. Bagaimana BPS Provinsi dapat berkoordinasi dengan Dinsos untuk pelatihan pendamping? (BPS provinsi menyediakan link zoom dan menyediakan tenaga pengajar (innas))
3. Bagaimana strategi untuk memastikan pendamping PKH memahami materi pelatihan

# ***Terima Kasih!***

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

.....

